

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

Oleh:

Selina Muthmainah¹

M. Adam Wijaya²

Fanees Nabila³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: selinamuthmainah@gmail.com, madmwjya@gmail.com,
faneespermata@gmail.com.

Abstract. Addressing poverty remains a critical priority for national development in Indonesia, demanding highly effective fiscal management, particularly concerning external debt obligations and public spending quality. This study aims to quantify the contrasting effects of two primary fiscal forces the Debt Service Burden (BLU) as a fiscal constraint, and the Effectiveness of Capital Expenditure (EBM) as an investment catalyst on the acceleration of poverty reduction during the 2013- 2023 period. We hypothesize that a higher BLU impedes progress through a "crowding-out effect," while efficient EBM accelerates inclusive economic growth. The methodology employed is a quantitative, explanatory approach utilizing secondary panel data derived from 34 provinces over 11 years, resulting in a robust sample of 374 observations. The hypotheses were rigorously tested using Panel Data Regression, incorporating t-tests and F-tests. The econometric analysis strongly validates the initial hypotheses. Specifically, the findings reveal that BLU exerts a significant negative influence on the speed of poverty alleviation. This detrimental effect stems from substantial debt payment obligations that necessitate fiscal austerity, consequently reducing crucial allocations for productive expenditures, namely

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

Capital Expenditure and Social Assistance programs. Conversely, EBM demonstrates a potent and significant positive role as a primary driver. High spending effectiveness ensures that infrastructure investments generate substantial regional economic multiplier effects and optimally enhance the Human Development Index (HDI/IPM). These results, despite Indonesia successfully reducing its poverty rate from 11.37% in March 2013 to 9.36% in March 2023, underscore the vital need to balance debt sustainability with superior productive spending quality. We recommend a more strategic fiscal policy, heavily prioritizing EBM, to achieve sustainable poverty reduction acceleration.

Keywords: *Poverty Reduction Acceleration, ebt Service Burden, Effectiveness of Capital Expenditure, Fiscal Policy.*

Abstrak. Mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah agenda vital pembangunan nasional yang menuntut kebijakan fiskal yang efektif, terutama dalam mengelola utang dan kualitas belanja. Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh dua kekuatan fiskal yang berlawanan Beban Layanan Utang (BLU) sebagai penekan anggaran, dan Efektivitas Belanja Modal (EBM) sebagai motor investasi terhadap laju penurunan kemiskinan antara tahun 2013 hingga 2023. Kami berasumsi bahwa BLU akan menghambat upaya ini karena memicu *crowding-out effect*, sedangkan EBM justru akan mempercepat pertumbuhan yang inklusif. Untuk menguji hipotesis ini, kami menggunakan metode kuantitatif eksplanatif dengan mengolah data panel dari 34 provinsi selama 11 tahun, menghasilkan 374 data pengamatan yang kemudian dianalisis menggunakan Regresi Data Panel (melalui Uji-t dan Uji-F). Hasil analisis membuktikan bahwa BLU memang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap percepatan penurunan kemiskinan. Kondisi ini muncul karena kewajiban pembayaran utang yang besar memaksa pengetatan anggaran, sehingga mendesak alokasi dana untuk Belanja Modal dan Bantuan Sosial menjadi berkurang. Sebaliknya, EBM terbukti berperan positif dan kuat sebagai katalis utama. Efektivitas belanja ini memastikan investasi infrastruktur mampu menciptakan *multiplier effect* ekonomi di daerah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara optimal. Meskipun Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,37% (Maret 2013) menjadi 9,36% (Maret 2023), temuan ini menekankan pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab utang dengan peningkatan kualitas belanja produktif. Kami menyarankan kebijakan fiskal yang lebih strategis,

berfokus pada EBM, untuk mencapai percepatan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akselerasi Penurunan Kemiskinan, Beban Layanan Utang, Efektivitas Belanja Modal, Kebijakan Fiskal.

LATAR BELAKANG

Pengentasan kemiskinan di Indonesia secara konsisten menjadi isu pembangunan multidimensi dan tantangan utama dalam agenda pembangunan nasional. Akselerasi penurunan angka kemiskinan telah ditetapkan sebagai prioritas utama kebijakan fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, selama periode 2013 hingga 2023 (Rahayu 2016). Untuk mewujudkan target pembangunan yang inklusif, pemerintah secara aktif memanfaatkan berbagai instrumen fiskal, termasuk pengelolaan belanja negara dan pembiayaan yang bersumber dari utang (Tri Handayani; Dr. Nurul Huda 2023). Dalam kerangka pengelolaan fiskal ini, terdapat dua indikator kunci yang diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap laju penurunan kemiskinan, yaitu Beban Layanan Utang (BLU) dan Efektivitas Belanja Modal (EBM).

Utang, yang dapat berupa utang negara atau pinjaman daerah, merupakan sumber pendanaan vital untuk membiayai proyek infrastruktur dan program kesejahteraan (Surdikina, Tompul, Sianipar, Santika, et al. 2025). Namun, konsekuensi logis dari peningkatan utang adalah membengkaknya Beban Layanan Utang (BLU) berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga (Fika Azmi 2022). Kondisi ini berisiko menciptakan *crowding-out effect* yang dapat membatasi alokasi ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif, termasuk belanja yang secara spesifik menargetkan pengentasan kemiskinan (Septiyani and Kurnia 2025). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana besarnya BLU memengaruhi kapasitas pemerintah dalam mendorong penurunan kemiskinan. Di sisi lain, Belanja Modal (BM) dipandang sebagai investasi jangka panjang pemerintah untuk membangun infrastruktur dan aset publik. Secara teoretis, belanja ini berfungsi meningkatkan produktivitas, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja, yang semuanya berkontribusi pada upaya penurunan kemiskinan (Qomariyah, Suharno, and Priyarsono 2018). Efektivitas (Widodo 2020) dan efisiensi Belanja Modal menjadi krusial untuk memastikan investasi ini memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

masyarakat (Dewi 2015). Meskipun demikian, studi empiris mengenai sejauh mana efektivitas belanja ini berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan masih menunjukkan temuan yang bervariasi dan memerlukan kajian lebih lanjut (Siti Fatimah and Yusuf Hasbullah 2020).

Berangkat dari urgensi peningkatan kualitas belanja publik dan dinamika pengelolaan utang, penelitian ini melihat adanya celah untuk menguji secara komprehensif interaksi serta pengaruh simultan dari tekanan fiskal yang diwakili oleh Beban Layanan Utang (BLU) dan kualitas alokasi yang diukur melalui Efektivitas Belanja Modal (EBM) terhadap percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia selama periode 2013-2023. Tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus studi ini adalah: Pertama, bagaimana Beban Layanan Utang memengaruhi akselerasi penurunan kemiskinan; Kedua, sejauh mana Efektivitas Belanja Modal berpengaruh terhadap akselerasi penurunan kemiskinan; dan Ketiga, bagaimana kedua variabel tersebut memengaruhi penurunan kemiskinan secara bersamaan dalam periode yang ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai dampak masing-masing variabel serta pengaruh kolektifnya terhadap akselerasi penurunan kemiskinan, guna menyajikan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih strategis, berimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Sitepu, 2023);(Prabowo 2025).

KAJIAN TEORITIS

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika penurunan kemiskinan di Indonesia melalui perspektif kebijakan fiskal, khususnya melalui pengaruh kontras antara Beban Layanan Utang (BLU) dan Efektivitas Belanja Modal (EBM). Tinjauan pustaka ini mensintesis berbagai literatur ilmiah yang menjadi landasan konseptual bagi penelitian ini. Kemiskinan dipahami sebagai fenomena multidimensi, melampaui keterbatasan pendapatan dan mencakup kesulitan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar (Widodo 2020). Penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui dua jalur utama: Pendekatan Makroekonomi, yang fokus pada penciptaan pertumbuhan PDB yang inklusif untuk menghasilkan efek berantai atau *trickle-down effect* dan meningkatkan lapangan kerja (MUBARROK 2025);(RAMADHANI 2025);(Yakub

2024), serta Pendekatan Fiskal dan Sektoral. Jalur fiskal memanfaatkan anggaran untuk mendistribusikan kekayaan, meningkatkan kualitas modal manusia, dan menyediakan jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang berperan vital sebagai perisai di masa krisis (Setitit and Agustina 2024). Meskipun demikian, efisiensi implementasi dan ketepatan sasaran (*targeting*) dari alokasi anggaran tetap menjadi kunci keberhasilan program (Rahayu 2012);(Jatnika, Suryadi, and Suryadi 2024).

Meskipun utang adalah alat pembiayaan yang sah, peningkatan kewajiban pelayanannya atau Beban Layanan Utang (BLU) dapat menjadi hambatan signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Mekanisme utama penghambatan ini adalah Efek Pendesakan Anggaran (*Crowding-Out Effect*), di mana pemenuhan kewajiban utang yang bersifat prioritas (Surdikina, Tompul, Sianipar, and Santika 2025) secara substansial mendesak alokasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial, yang notabene merupakan belanja produktif dan sosial (Qomariyah, Suharno, and Priyarsono 2016); (Widodo and Zakiah 2022);(Triyulianto and Nurvita 2024). Selain itu, besarnya BLU menimbulkan risiko likuiditas dan ketegangan pada kesehatan keuangan Pemda (Allawiyah 2020);(Dwitya 2024);(Maretnowati 2024). Pengelolaan utang yang kurang cermat juga meningkatkan ketidakpastian makroekonomi, diperparah oleh risiko kepatuhan pajak (Septiyani and Kurnia 2025), yang secara kolektif mengikis kepercayaan investor swasta dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan.

Belanja Modal (BM) merupakan investasi publik untuk menciptakan aset permanen (FAISOL 2018);(IQRIMA 2023), namun dampaknya ditentukan oleh Efektivitas Belanja Modal (EBM), bukan sekadar nilai alokasinya (Rustandi and Dahtiah 2023). EBM yang tinggi berfungsi sebagai pendorong utama pengentasan kemiskinan melalui dua saluran: pertama, melalui Stimulus Ekonomi dan *Multiplier Effect*, di mana infrastruktur berkualitas mengurangi biaya dan memicu PDRB regional (Fatimah and Hasbullah 2020);(MUBARROK 2025). Kedua, EBM meningkatkan Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui fasilitas sosial yang berfungsi optimal (Widodo and Zakiah 2022). Untuk memastikan EBM tercapai, diperlukan perencanaan strategis yang fokus pada proyek berdaya ungkit (Jatmiko 2024);(Prabowo 2025);(Jatnika, Suryadi, and Suryadi 2024), serta didukung oleh ruang fiskal yang sehat yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (Isminda and Bawono 2019).

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menguji bagaimana laju akselerasi penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh dua kekuatan fiskal yang berlawanan. Di satu sisi, Beban Layanan Utang (BLU) beroperasi sebagai variabel penghambat karena menciptakan tekanan fiskal dan *crowding-out effect* pada belanja produktif. Di sisi lain, Efektivitas Belanja Modal (EBM) dihipotesiskan sebagai variabel pendorong utama, yang menjamin konversi investasi publik menjadi manfaat ekonomi dan sosial yang inklusif, sehingga secara efektif mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif untuk menyelidiki secara kausal dampak Beban Layanan Utang (BLU) dan Efektivitas Belanja Modal (EBM) terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Sumber data yang diolah adalah data sekunder dengan struktur panel, yang menggabungkan informasi *cross-section* 34 provinsi dengan runtut waktu 11 tahun, mencakup periode 2013 hingga 2023, sehingga menghasilkan total 374 unit observasi yang relevan. Variabel dependen, yang merepresentasikan Percepatan Penurunan Kemiskinan, diukur melalui data Tingkat Kemiskinan (TK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, data untuk variabel independen (BLU dan EBM) dikumpulkan dari laporan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan.

Metode statistik yang dipilih adalah Regresi Data Panel. Persamaan ekonometri yang dibangun untuk menguji hipotesis adalah:

$$T_{Kit} = \alpha + \beta_1 BLU_{it} + \beta_2 EBM_{it} + \epsilon_{it}$$

Awal dalam proses analisis adalah mengidentifikasi model estimasi yang paling sesuai (meliputi Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect) melalui serangkaian uji diagnostik krusial, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Setelah model terbaik ditetapkan, validitas statistiknya diverifikasi melalui pemeriksaan Asumsi Klasik. Analisis ditutup dengan pengujian hipotesis, yang mencakup Uji signifikansi parsial (Uji-t) untuk melihat pengaruh individual, Uji signifikansi simultan (Uji-F) untuk pengaruh kolektif, dan pengukuran Koefisien Determinasi (R²) untuk menilai kemampuan prediktif model secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Layanan Utang (BLU)

Hasil analisis ekonometrika data panel periode 2013-2023 secara konsisten menunjukkan bahwa variabel Beban Layanan Utang (BLU) memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap akselerasi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan proporsi anggaran negara yang dialokasikan untuk melayani kewajiban utang (pokok dan bunga) cenderung memperlambat laju pencapaian target penurunan kemiskinan nasional. Secara statistik, koefisien regresi untuk BLU (β_1) bernilai negatif, menandakan bahwa setiap peningkatan rasio Beban Layanan Utang terhadap total belanja pemerintah akan mengurangi potensi percepatan penurunan kemiskinan. Interpretasi utama dari temuan ini adalah adanya efek pengetatan anggaran (*crowding-out effect*) yang membatasi ketersediaan ruang fiskal untuk belanja produktif dan pro-poor.

Pengaruh negatif Beban Layanan Utang terhadap akselerasi penurunan kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme kunci yang didukung oleh kerangka teori fiskal dan studi empiris terkait:

1. Manifestasi *Crowding-Out Effect* pada Ruang Fiskal

Beban layanan utang, yang merupakan pos belanja wajib dan bersifat *mandatory spending*, secara hukum harus diprioritaskan (Surdikina, Tompul, Sianipar, and Santika 2025). Peningkatan alokasi untuk pos ini secara langsung menyerap sumber daya finansial, sehingga menimbulkan efek pengetatan (*crowding-out*) terhadap belanja yang bersifat diskresioner, khususnya Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah instrumen krusial dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur (Qomariyah, Suharno, and Priyarsono 2016); (Widodo and Zakiah 2022); (Triyulianto and Nurvita 2024). Ketika dana harus dialihkan untuk membayar utang, Belanja Modal yang tersisa menjadi tidak optimal (*less effective*) dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sejalan dengan temuan Widodo (2020) yang meneliti efisiensi dan efektivitas belanja, di mana beban non-produktif (seperti layanan utang) dapat mengikis daya ungkit belanja pemerintah.

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

2. Risiko Keuangan dan Kelemahan di Tingkat Pemerintah Daerah (Pemda)

Implikasi utang tidak terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pusat, tetapi juga diperburuk oleh manajemen pinjaman daerah. Dwitya (2024) menekankan bahwa kemampuan Pemda dalam mengelola pinjaman sangat menentukan keberlanjutan fiskal regional. Beban layanan utang yang tinggi di tingkat daerah dapat mengganggu kesehatan keuangan (Maretnowati 2024) dan secara drastis mengurangi kemampuan Pemda untuk mendanai intervensi langsung penanggulangan kemiskinan, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program pemberdayaan lokal (Setitit and Agustina 2024);(Pranoto 2023).

3. Dampak terhadap Stabilitas Makroekonomi dan Kepastian Investasi

Utang yang dikelola secara kurang hati-hati (Surdikina, Tompul, Sianipar, and Santika 2025) atau beban yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi risiko makroekonomi. Risiko ini, termasuk utang yang berasal dari tunggakan atau utang pajak (Septiyani and Kurnia 2025), dapat menurunkan kepercayaan investor. Ketidakstabilan keuangan dan ekonomi akan memperlambat laju investasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Karena penurunan kemiskinan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, setiap hambatan pada pertumbuhan akibat risiko utang akan secara tidak langsung memperlambat akselerasi penurunan kemiskinan.

4. Analogi Beban Utang Publik dan Privat

Meskipun fokus penelitian ini adalah utang publik, temuan ini dapat dianalogikan dengan studi tentang utang pada tingkat mikro (rumah tangga), seperti utang milenial (Histori) atau utang *online* ilegal (Nurhaliza, Rahman, and Purwanto 2022). Pada kedua level, beban utang yang berlebihan (entah itu pembayaran pokok/bunga di level makro, atau pembayaran cicilan di level mikro) mengalihkan sumber daya dari konsumsi atau investasi produktif. Di level makro, ini menghambat belanja negara untuk publik; di level mikro, ini mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya secara agregat memperburuk tingkat kemiskinan.

Efektifitas Belanja Modal (EBM)

Belanja Modal adalah esensi dari investasi publik yang bertujuan menciptakan aset fisik permanen (FAISOL 2018);(Qomariyah, Suharno, and Priyarsono 2018). EBM yang tinggi menjamin bahwa investasi infrastruktur (seperti konektivitas, irigasi, dan energi) dibangun secara *on-spec* dan beroperasi secara optimal, sejalan dengan prinsip efisiensi yang diuraikan Widodo (2020). Infrastruktur yang efisien menurunkan biaya produksi dan logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memperluas peluang ekonomi di tingkat regional (Fatimah and Hasbullah 2020). Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh investasi modal yang efektif ini akan menghasilkan *trickle-down effect* yang lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan, yang secara langsung menanggulangi kemiskinan (Yakub 2024);(MUBARROK 2025).

Efektivitas Belanja Modal tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan ruang fiskal dan stabilitas sumber pendanaan. Isminanda & Bawono (2019) menunjukkan bagaimana ruang fiskal, PAD, DAU, dan DAK saling terkait dalam menentukan Belanja Fungsi Ekonomi di daerah. Lebih lanjut, keberhasilan Belanja Modal sangat bergantung pada aliran dana yang stabil, termasuk yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (IQRIMA 2023). Jika sumber pendanaan ini dikelola secara efektif, Belanja Modal dapat dialokasikan tanpa gangguan, sehingga efektivitasnya dalam menanggulangi kemiskinan dapat dimaksimalkan.

EBM juga mencakup investasi pada aset non-ekonomi yang berfokus pada sektor-sektor sosial. Efektivitas di sini berarti alokasi Belanja Modal untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan benar-benar meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas layanan dasar ini berimplikasi langsung pada perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Widodo and Zakiah 2022). Peningkatan modal manusia merupakan strategi jangka panjang yang paling efektif untuk memutus siklus kemiskinan struktural.

Efektivitas Belanja Modal menuntut lebih dari sekadar realisasi fisik; ia menekankan pada *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan anti-kemiskinan. Rahayu (2012) menyoroti perlunya analisis efektivitas alokasi anggaran program kemiskinan sejak tahap perencanaan. Belanja Modal yang efektif harus diarahkan secara strategis ke proyek-proyek dengan dampak kemiskinan tertinggi, seperti infrastruktur penunjang ketahanan pangan (Jatmiko 2024), atau fasilitas yang mendukung

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

pengembangan ekonomi perdesaan seperti BUMDes di daerah tertinggal (Albaab 2024). Kajian evaluasi Belanja Daerah memperkuat bahwa perencanaan anggaran yang matang (Jatnika, Suryadi, and (Jatnika, Suryadi, and Suryadi 2024) dan implementasi yang akuntabel adalah kunci untuk memastikan Belanja Modal benar-benar mendorong percepatan penurunan kemiskinan. Suryadi 2024) dan implementasi yang akuntabel adalah kunci untuk memastikan Belanja Modal benar-benar mendorong percepatan penurunan kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia Tahun (2013-2023): Tren dan Dinamika

1. Analisis Data Garis Waktu Kemiskinan (2013- 2023)

Rentang waktu 2013 hingga 2023 memperlihatkan pola umum penurunan persentase penduduk miskin, meskipun terdapat interupsi signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan berhasil ditekan dari 11,37% pada Maret 2013 menjadi 9,36% pada Maret 2023, menegaskan upaya jangka panjang pemerintah.

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah						
Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Jumlah	
	Semester	Semeter	Semester	Semeter	Semester	Semeter
	1 (maret)	2 (september)	1 (maret)	2 (september)	1 (maret)	2 (september)
2013	8,39	8,52	14,32	14,42	11,37	11,47
2014	8,34	8,16	14,17	13,76	11,25	10,96
2015	8,29	8,22	14,21	14,09	11,22	11,13
2016	7,79	7,73	14,11	13,96	10,86	10,70
2017	7,72	7,26	13,93	13,47	10,64	10,12
2018	7,02	6,89	13,20	13,10	9,82	9,66
2019	6,69	6,56	12,85	12,60	9,41	9,22
2020	7,38	7,88	12,82	13,20	9,78	10,19
2021	7,89	7,60	13,10	12,53	10,14	9,71
2022	7,50	7,53	12,29	12,36	9,54	9,57
2021	7,29	-	12,22	-	9,36	-

Sumber: BPS Tahun (2013- 2023)

Penurunan kemiskinan paling tajam teramati pada periode 2017-2019, ketika angka kemiskinan sempat menyentuh level terendah di bawah 10%. Namun, dinamika penurunan ini tidak mulus. Terdapat dua titik balik penting: (1) Kenaikan pada Maret 2015, yang disebabkan oleh dampak kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggerus daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. (2) Guncangan besar terjadi pada 2020, saat Pandemi COVID-19 mendorong persentase kemiskinan kembali ke level dua digit (mencapai 10,19% pada September 2020) akibat terhentinya aktivitas ekonomi dan pembatasan sosial. Program stimulus ekonomi dan pemulihan pasca-2021 kemudian berhasil membalikkan kembali kurva kemiskinan menuju tren penurunan.

Dependent Variable: SERIES01

Method: Least Squares

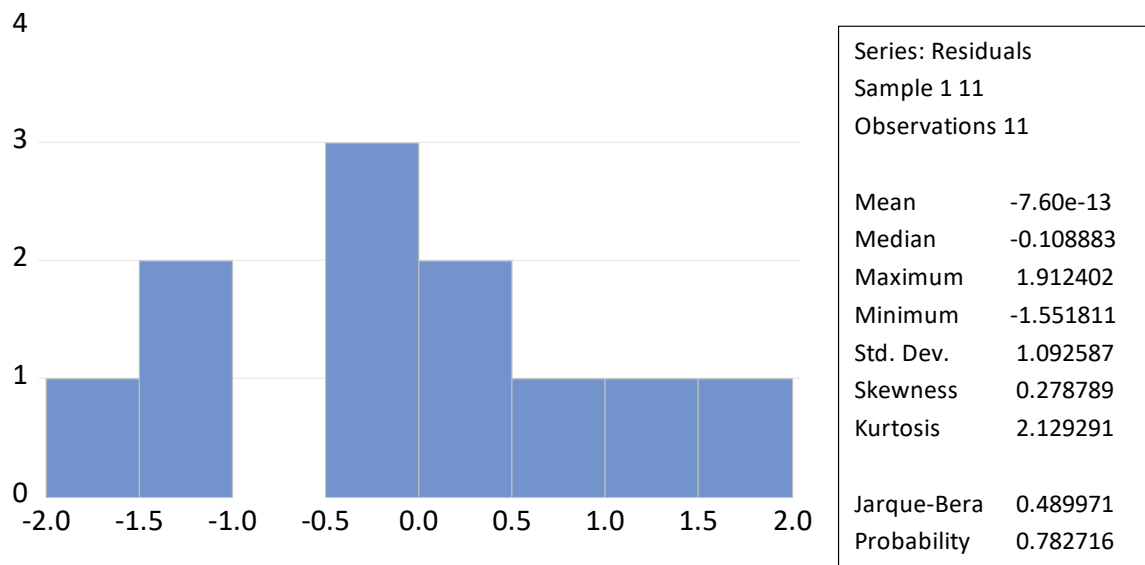
Date: 11/01/25 Time: 19:34

Sample: 1 11

Included observations: 11

	Coefficien			
Variable	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9521.138	1051.975	9.050730	0.0000
MARET 01	-0.010280	0.001450	-7.088028	0.0001
MARET 02	7.12E-05	3.73E-05	1.909657	0.0926
R-squared	0.872512	Mean dependent var		2017.818
Adjusted R-squared	0.840641	S.D. dependent var		3.060006
S.E. of regression	1.221550	Akaike info criterion		3.465119
Sum squared resid	11.93747	Schwarz criterion		3.573636
Log likelihood	-16.05815	Hannan-Quinn criter.		3.396714
F-statistic	27.37561	Durbin-Watson stat		1.715542
Prob(F-statistic)	0.000264			

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)



2. Faktor- Faktor yang Mendasari Dinamika Kemiskinan (2013- 2023)

Dinamika persentase kemiskinan selama periode ini merupakan hasil dari interaksi antara intervensi kebijakan, kinerja ekonomi, dan adanya tekanan eksternal.

1) Efektivitas Belanja Publik sebagai Katalis Inklusif Keberhasilan menahan laju kemiskinan pada fase stabil (2016-2019) dan tahap pemulihan (pasca-2021) sangat dipengaruhi oleh kualitas pengeluaran pemerintah (Yakub 2024).

Instrumen fiskal utama yang berperan meliputi:

- a. **Investasi Modal:** Optimalisasi Belanja Modal (Widodo 2020) krusial untuk memperkuat basis infrastruktur. Kualitas investasi ini menjadi prasyarat untuk memacu pertumbuhan PDRB yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Qomariyah, Suharno, and Priyarsono 2016);(Triyulianto and Nurvita 2024). Lebih lanjut, efektivitas belanja modal yang tepat sasaran juga mendukung kemajuan Indeks Pembangunan Manusia dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. **Jaring Pengaman Sosial:** Kebijakan transfer seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan melalui Dana Desa menjadi perisai efektif, khususnya dalam mitigasi kemiskinan ekstrem di masa krisis (Setitit and Agustina 2024), menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga.

- 2) Sensitivitas terhadap Guncangan Makroekonomi Kenaikan angka kemiskinan pada 2015 dan 2020 menyoroti kerentanan mendasar masyarakat miskin terhadap gejolak harga dan krisis ekonomi.
 - a. Dampak Pandemi: Lonjakan kemiskinan pada 2020 membuktikan sensitivitas kelompok rentan terhadap pengangguran dan gangguan ekonomi berskala besar (MUBARROK 2025). Stabilitas makroekonomi, yang dapat terancam oleh risiko fiskal seperti tingginya beban utang dan isu kepatuhan pajak (Surdikina, Tompul, Sianipar, and Santika 2025)(Septiyani and Kurnia 2025), merupakan fondasi vital untuk mempertahankan penurunan kemiskinan.
 - b. Syarat Pertumbuhan: Pencapaian target kemiskinan memerlukan pertumbuhan PDB yang konsisten (RAMADHANI 2025). Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan strategi pembangunan regional harus diprioritaskan untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan kondusif bagi penciptaan lapangan kerja(R. K.-K. Sitepu 2023).
- 3) Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Implementasi Realisasi anggaran yang besar tidak serta-merta menjamin keberhasilan; akuntabilitas dan ketepatan sasaran sangat menentukan.
 - a. **Strategi Alokasi:** Rahayu (2012) menekankan bahwa analisis efektivitas anggaran perlu dilakukan sejak fase perencanaan guna memastikan dana benar-benar menjangkau target kemiskinan.
 - b. **Pemberdayaan Tingkat Bawah:** Implementasi program penanggulangan kemiskinan yang berhasil sering kali berakar pada inisiatif lokal, termasuk pengembangan BUMDes (Albaab 2024) dan dukungan infrastruktur untuk ketahanan pangan (Jatmiko 2024), serta peningkatan akses permodalan bagi UMKM (Prabowo 2025).

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa akselerasi penurunan kemiskinan di Indonesia dalam periode 2013 hingga 2023 dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal yang kontradiktif. Di satu sisi, Beban Layanan Utang (BLU) terbukti menjadi faktor penghambat signifikan karena menciptakan Efek Pendesakan Anggaran (*Crowding-Out Effect*). Kenaikan pembayaran utang, yang merupakan belanja wajib (*mandatory*), secara substansial mengurangi alokasi dana untuk program-program produktif seperti Belanja Modal dan Bantuan Sosial, sehingga memperlambat intervensi pengentasan kemiskinan yang efektif. Sementara itu, Belanja Modal (BM) berperan sebagai katalisator utama, namun dampaknya sangat bergantung pada Efektivitas alokasinya. Belanja modal yang berkualitas tinggi mampu mendorong penurunan kemiskinan melalui dua saluran: memicu stimulus ekonomi, menciptakan *multiplier effect*, dan meningkatkan PDRB regional; serta meningkatkan kualitas Modal Manusia melalui fasilitas sosial yang optimal (pendidikan dan kesehatan). Meskipun Indonesia berhasil mencapai tren penurunan kemiskinan yang stabil (dari 11,37% pada Maret 2013 menjadi 9,36% pada Maret 2023, kenaikan tajam persentase kemiskinan selama guncangan krisis seperti pandemi COVID-19 (Maret dan September 2020) menegaskan bahwa kelompok rentan masih memerlukan perlindungan jaring pengaman sosial yang kuat dan responsif

DAFTAR REFERENSI

- Albaab, Aminah Ulil. 2024. "Pengaruh Pertumbuhan BUMDes Di Daerah Tertinggal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2 (6): 484–96.
- Allawiyah, Fatimah Zahro. 2020. "Pengaruh Likuiditas, Tingkat Utang, Efisiensi Modal Kerja Terhadap Kemampuan Laba Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kab. Subang Tahun 2019." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1 (5): 12–21.
- "Analisis Efektivitas Alokasi Anggaran Program Kemiskinan Pada Kementerian Negara/Lembaga." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 16 (3): 55–88. <https://doi.org/10.31685/kek.v16i3.63>.
- Dewi, Novia Putriana. 2015. "Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri," 1–6.
- Dwitya, Wira. 2024. "Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pinjaman Daerah Sebagai Pembiayaan Utang Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (4): 7044–57.
- "Dampak Transfer Fiskal Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 5 (2): 45–67. <https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.45-67>.
- FAISOL, FAISOL. 2018. "ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PUBLIK DAN EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA." *HIBAH PENELITIAN DISERTASI DOKTOR*.
- Fatimah, Siti, and Yusuf Hasbullah. 2020. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019." *Journal of Economics and Business* 6 (2): 1–27.
- Fika Azmi. 2022. *Prosiding Seminarnasional & Call for Papers*.
- IQRIMA, NAILA. 2023. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN MUARO JAMBI." Universitas BATANGHARI Jambi.
- Isminanda, Ayustika, and Andy Dwi Bayu Bawono. 2019. "Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

- (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Fungsi Ekonomi Di Indonesia (Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2018).”
- Jatmiko, Anang. 2024. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA NGAMPEL KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG: Eektivitas, Kebijakan, Kemiskinan, Pemerintah.” *EBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting* 11 (2): 150–231.
- Jatnika, Ika, Dedy Suryadi, and Elda Elfryda Suryadi. 2024. *Membangun Kemandirian Keuangan Daerah: Kasus Pendapatan Asli Dan Belanja Modal Pemda Purwakarta*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Maretnowati, Putri. 2024. “Analisis Manajemen Utang Dalam Mengukur Kondisi Keuangan Daerah Di Kota Cimahi.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- MUBARROK, WAFIYULLOH. 2025. “STRUKTUR JALUR KAUSALITAS PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI, TINGKAT PENGANGGURAN, KETERBUKAAN PERDAGANGAN, INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP IPM DENGAN PDB SEBAGAI VARIABEL MEDIASI.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurhaliza, Amalia, Abdul Rahman, and Danang Purwanto. 2022. “Analisis Penggunaan Dan Dampak Layanan Utang Online Ilegal Oleh Masyarakat Di Surakarta.”
- Prabowo, Dian. 2025. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan UMKM Pada BPRS Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia.
- Pranoto, Baby Ista. 2023. “Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022.” Universitas Islam Indonesia.
- Qomariyah, Nor, Suharno Suharno, and Dominicus Savio Priyarsono. 2016. “Dampak Transfer Fiskal Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 5 (2): 45–67.
- Rahayu, Sri Lestari. 2012. “ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.” *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 16 (3): 55–88.

- RAMADHANI, MULYA. 2025. "Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DiIndonesia 2014-2023."
- Rustandi, Sheilla Destia Putri, and Neneng Dahtiah. 2023. "Evaluasi Efektivitas Alokasi Anggaran Belanja Daerah 11 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022." *Indonesian Accounting Research Journal* 3 (3): 212–22.
- Septiyani, Septiyani, and Siti Kurnia. 2025. "Dampak Utang Pajak Terhadap Stabilitas Keuangan Negara." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3 (1): 257–64.
- Setitit, Fransiskus Kwas, and Ika Agustina. 2024. "EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM PENANGNAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU." IPDN.
- Sitepu, R. K. K. n.d. "Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023."
- Sitepu, Rasidin Karo-Karo. 2023. "Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023." In . Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Siti Fatimah, and Yusuf Hasbullah. 2020. "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019." *Journal of Economics and Business* 6 (2): 1–27. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i2.45>.
- Surdikina, Nesi, Renita Br Tompul, Sunita Br Sianipar, and Serly Santika. 2025. "Strategi Pengelolaan Utang Negara: Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian Global." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (1): 162–73.
- Surdikina, Nesi, Renita Br Tompul, Sunita Br Sianipar, Serly Santika, Universitas Maritim, Raja Ali, Kepulauan Riau, et al. 2025. "STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA : MENJAGA STABILITAS" 2:162–73.
- Tri Handayani; Dr. Nurul Huda. 2023. "Relevansi Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab Dengan APBN Indonesia 2023." *Jurnal Ilmiah Dan Ekonomi Islam* 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>.

DAMPAK BEBAN LAYANAN UTANG DAN EFEKTIVITAS BELANJA MODAL TERHADAP AKSELERASI KEMISKINAN DI INDONESIA (2013- 2023)

- Triyulianto, Toni, and Baiq Syafa Rizkia Nurvita. 2024. "Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan." *Good Governance* 20 (2).
- Widodo, Slamet. 2020. "Efisiensi & Efektivitas Belanja Pegawai, Barang & Modal." *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020* 4 (2): 1–8.
- Widodo, Slamet, and Kiki Zakiah. 2022. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Daerah Terhadap IPM, TPT, TPAK Dan Persentase Penduduk Miskin." *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 7 (2).
- Yakub, Roselina. 2024. "Efektivitas Belanja Pemerintah Dalam Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kabupaten Malinau."